

Untuk Apa Kita Hidup Bersama?

Manifesto Sophokrasi tentang Negara dan Kesadaran

Gus Sohe

Untuk Apa Kita Hidup Bersama?

Manifesto Sophokrasi tentang Negara dan Kesadaran

Oleh Gus Sohe

Catatan Penulis

Tulisan ini lahir dari kegelisahan yang sangat sederhana, bahkan mungkin terlalu manusiawi, kegelisahan melihat jarak yang semakin lebar antara apa yang dijanjikan negara dan apa yang sungguh dialami oleh manusia yang hidup di dalamnya.

Aku lahir dan tumbuh di Indonesia, sebuah negara yang lahir dari sejarah penderitaan, penjajahan, dan cita-cita pembebasan. Proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung janji yang luhur, yaitu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan, dan mewujudkan keadilan sosial. Janji itu tidak pernah terdengar remeh bagiku. Justru karena aku mempercayainya, aku merasa perlu bertanya ketika janji itu semakin sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Aku melihat negara bekerja dengan sangat rapi dalam bahasa hukum, data ekonomi, dan statistik pembangunan. Namun di saat yang sama, aku melihat terlalu banyak manusia yang sejak lahir sudah harus memikul beban yang seharusnya tidak pernah menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Anak-anak yang tumbuh tanpa jaminan sandang, pangan, dan papan yang layak. Ibu yang mengandung dengan kecemasan tentang biaya hidup, bukan ketenangan untuk merawat kehidupan baru. Manusia yang sejak awal hidupnya sudah disibukkan dengan bertahan, sehingga tak pernah benar-benar diberi ruang untuk tumbuh.

Dari situ, pertanyaanku tidak lagi bersifat teoritis. Ia menjadi sangat konkret, yaitu untuk apa negara ada? jika pada tingkat paling dasar ia gagal menyediakan kondisi minimal agar manusia bisa hidup dengan layak. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang ekonomi makro, pertumbuhan, dan kemajuan, jika pada skala paling mikro, satu manusia, satu keluarga, kebutuhan primer masih dianggap sebagai masalah individu?

Manifesto ini tidak lahir dari kebencian terhadap negara, apalagi dari keinginan untuk meruntuhkannya. Ia lahir dari kelelahan batin melihat negara berubah menjadi entitas yang semakin jauh dari manusia yang seharusnya ia lindungi. Aku tidak menulis sebagai pengamat netral, tetapi sebagai bagian dari kehidupan bersama itu sendiri, sebagai seseorang yang masih ingin percaya, bahwa hidup bersama bisa diatur dengan cara yang lebih sadar dan lebih adil.

Pilihan untuk menulis manifesto ini dalam bentuk pertanyaan adalah pilihan yang sangat sadar. Aku tidak percaya kesadaran lahir dari pengajaran yang merasa sudah tahu. Aku percaya kesadaran lahir ketika seseorang dipaksa, bukan oleh orang lain, tetapi oleh dirinya sendiri, untuk berhadapan dengan pertanyaan yang tidak lagi bisa dihindari. Pertanyaan-pertanyaan dalam tulisan ini adalah pertanyaan yang terlebih dahulu aku ajukan kepada diriku sendiri.

Istilah *Sophokrasi* muncul dari upaya memberi nama pada kegelisahan itu, sebuah cara berpikir yang menempatkan kesadaran dan kebijaksanaan sebagai dasar hidup bersama, bukan kekuasaan, bukan hukum yang kering, dan bukan klaim moral yang merasa paling benar. Sophokrasi bukan ideologi yang harus dianut, melainkan kemungkinan yang bisa dipikirkan, atau ditolak, secara jujur.

Aku sepenuhnya menyadari bahwa gagasan-gagasan dalam tulisan ini bersifat personal. Ia lahir dari pengalaman, dari kekecewaan, dan dari harapan yang tidak ingin aku bunuh hanya karena realitas terasa sangat berat. Namun justru karena ia personal, aku berharap ia dapat dibaca secara kolektif, sebagai cermin, dan bukan sebagai tuntutan.

Jika setelah membaca manifesto ini seseorang merasa terusik, ragu, atau bahkan tidak nyaman, aku menganggap itu bukan sebuah kegagalan. Mungkin di situlah kesadaran kecil mulai bekerja. Aku tidak akan menuntut kesepakatan. Aku hanya berharap pembaca bersedia jujur pada dirinya sendiri, jujur menanyakan apakah hidup bersama yang kita jalani hari ini, benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang kita ucapkan dengan bangga.

Tulisan ini tidak menawarkan akhir yang jelas, ia hanya menandai satu titik, titik di mana aku berhenti menerima begitu saja, dan memulai untuk bertanya kembali. Selebihnya, biarlah pertanyaan-pertanyaan itu hidup di luar teks ini, di dalam diri siapa pun yang masih merasa bahwa hidup bersama seharusnya lebih manusiawi daripada yang kita alami hari ini.

Pendahuluan Umum

Tentang Mengapa Kita Perlu Bertanya Kembali

Tulisan ini tidak lahir dari keyakinan bahwa kita memiliki jawaban yang lebih benar, ia lahir dari kecurigaan yang mungkin tenang, bahwa terlalu banyak hal dalam hidup bersama, telah kita terima tanpa pernah sungguh dipertanyakan.

Kita hidup di tengah sesuatu yang disebut negara. Kita tumbuh di dalamnya, tunduk pada hukumnya, menghafal simbol-simbolnya, dan sering kali membelanya, bahkan ketika kita tidak lagi tahu untuk apa ia ada. Negara menjadi latar belakang yang begitu akrab hingga nyaris tak terlihat, seperti udara yang kita hirup tanpa kita sadari. Dan justru karena itu, ia jarang disentuh oleh pertanyaan paling mendasar.

Manifesto ini tidak bermaksud meruntuhkan sebuah negara, apalagi menggantinya dengan dogma atau ajaran baru. Ia hanya ingin mengembalikan satu kebiasaan yang perlahan kita tinggalkan, yaitu bertanya sebelum patuh, merenung sebelum membenarkan, dan jujur sebelum membela.

Apakah hidup bersama selalu membutuhkan negara?

Jika negara memang diperlukan, untuk apa ia ada?

Dan jika ia ada atas nama kita semua, sejauh apa ia masih bekerja bagi kehidupan kita yang nyata, bukan sebagai abstraksi, konsep, statistik, atau kepentingan yang jauh dari keseharian manusia itu sendiri?

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering dianggap berbahaya. Bukan karena jawabannya pasti keliru, melainkan karena ia menggoyahkan sebuah kenyamanan. Ia memaksa kita keluar dari bahasa yang mapan, dari istilah yang sudah kita hafal, tetapi jarang kita rasakan maknanya. Namun tanpa keguncangan semacam itu, kesadaran hanya menjadi rutinitas intelektual, bukan pengalaman hidup.

Sophokrasi tidak ditawarkan sebagai sistem yang harus diimani, ia diajukan sebagai cara memandang ulang sebuah pandangan bahwa hidup bersama tidak bermula dari hukum, kekuasaan, atau wilayah, melainkan dari kesadaran manusia yang memilih untuk tidak hidup sendirian. Bahwa negara, jika memang ada, seharusnya lahir sebagai konsekuensi dari pilihan sadar itu, bukan sebagai penggantinya.

Karena itu, manifesto ini tidak akan mengajar siapapun. Ia tidak akan menyuruh, apalagi memerintah. Ia hanya bertanya, lalu berhenti sejenak, memberi ruang agar pembaca menjawabnya sendiri. Dan di antara pertanyaan-pertanyaan itu, akan ditawarkan satu kemungkinan bernama Sophokrasi, bukan sebagai sebuah kesimpulan, melainkan sebagai horizon berpikir yang mungkin, atau mungkin tidak, relevan bagi pengalaman hidup bersama kita hari ini.

Jika pada akhirnya tulisan ini hanya melahirkan satu hal, keraguan yang jujur terhadap apa yang selama ini kita anggap pasti, maka ia telah menjalankan fungsinya. Sebab dari keraguan yang jujur itulah kesadaran kecil ini bisa lahir, dan dari kesadaran kecil itulah konsep "hidup bersama" menemukan kembali maknanya.

BAGIAN I

Tentang Negara, Mengapa Kita Membentuknya?

Kapan terakhir kali kita bertanya mengapa negara dibentuk?

Bukan bagaimana cara memperbaikinya, bukan siapa yang harus memimpinnya, tetapi mengapa kita membutuhkannya sejak awal?

Apakah negara lahir dari pilihan sadar manusia untuk hidup bersama, atau dari ketakutan manusia untuk hidup sendirian?

Apakah negara ada karena kita menginginkannya, atau karena sejarah menempatkan kita di dalamnya tanpa pernah meminta persetujuan?

Pertanyaan ini tampak sederhana, namun jarang diajukan secara jujur. Kita lebih sering menerima negara sebagai sesuatu yang sudah ada, sebagai fakta yang tidak perlu dipersoalkan. Negara hadir sebagai warisan, dari masa lalu, dari penjajahan, dari revolusi, dari perjanjian, atau dari kekalahan dan kemenangan yang bahkan tidak kita alami sendiri. Kita dilahirkan di dalamnya, lalu diminta untuk menyesuaikan diri dengannya.

Tetapi apakah sesuatu yang diwariskan otomatis bermakna?

Manusia dapat hidup tanpa negara. Sejarah, antropologi, dan pengalaman hidup sederhana menunjukkan hal itu. Manusia bisa bekerja, berkeluarga, berkomunitas, bahkan menemukan makna hidup tanpa harus berada di bawah struktur yang disebut negara. Lalu jika demikian, maka negara bukanlah kebutuhan ontologis manusia, melainkan sebuah pilihan historis dan sosial.

Jika negara adalah pilihan, maka ia seharusnya dapat dipertanyakan. Dan jika ia dapat dipertanyakan, maka ia juga dapat ditolak, diubah, atau ditinggalkan, setidaknya secara etis.

Namun di titik inilah sering muncul sebuah ketakutan, tanpa negara, apakah hidup bersama tidak akan runtuh menjadi kekacauan? Apakah manusia tidak akan saling memangsa satu sama yang lain? Apakah ketertiban tidak memerlukan paksaan? Pertanyaan-pertanyaan ini mengungkap asumsi tersembunyi yang jarang kita sadari, bahwa manusia pada dasarnya tidak bisa dipercaya.

Dari asumsi inilah banyak negara dibangun, bukan di atas kesadaran, melainkan di atas kecurigaan. Negara lalu diposisikan sebagai penjinak, sebagai pengawas, dan sebagai pengendali. Hukum diciptakan untuk menahan, kekuasaan dibentuk untuk memaksa, dan ketaatan diminta atas nama ketertiban. Dalam kerangka ini, hidup bersama bukanlah perjumpaan secara sadar, melainkan kompromi yang lahir karena keterpaksaan.

Tetapi apakah hidup bersama hanya mungkin jika kita saling mencurigai?

Sophokrasi mengajukan satu kemungkinan lain, kemungkinan bahwa negara tidak perlu lahir dari ketakutan, melainkan dari kesadaran manusia akan keterbatasannya sendiri. Kesadaran bahwa manusia tidak bisa hidup sepenuhnya sendirian, dan bahwa kebersamaan membutuhkan pengaturan, bukan untuk menundukkan, tetapi untuk saling memungkinkan.

Dalam kemungkinan ini, negara bukan sebuah tujuan hidup, melainkan alat sementara. Ia bukan pusat akan segala makna, melainkan sebuah wadah. Ia tidak berdiri di atas manusia, tetapi muncul dari bawah, sebagai implikasi dari pilihan sadar untuk hidup bersama dalam skala yang lebih luas.

Jika demikian, negara tidak lagi perlu disakralkan. Ia tidak perlu dibela mati-matian hanya karena ia telah ada. Ia hanya perlu dijaga sejauh ia masih bekerja bagi kehidupan nyata manusia, bagi tubuh yang lapar, pikiran yang ingin tumbuh, dan bagi nurani yang ingin hidup tanpa rasa takut.

Pertanyaannya kemudian bukan lagi bagaimana menguatkan negara, melainkan apakah negara ini masih melayani sebuah alasan mengapa ia dibentuk?

Sophokrasi tidak menjawab pertanyaan itu dengan sebuah resep. Ia hanya menggeser titik berangkat pandangan kita. Bahwa sebelum kita berbicara tentang sistem, tentang kekuasaan, atau tentang hukum, kita perlu jujur terlebih dahulu, negara hanyalah salah satu cara manusia memilih untuk hidup bersama, dan setiap pilihan, sejauh ia dipilih secara sadar, selalu dapat ditinjau ulang.

Jika negara berhenti menjadi ruang yang memungkinkan hidup bersama secara bermakna, mungkin yang perlu dipertanyakan bukan manusianya, melainkan alasan negara itu terus dipertahankan.

BAGIAN II

Tentang Hidup Bersama, Apa yang Sebenarnya Kita Cari?

Jika negara bukan tujuan, lalu apa yang sebenarnya yang kita cari ketika memilih hidup bersama?

Apakah kita mencari keamanan?

Apakah kita mengejar kemakmuran?

Ataukah kita sekadar ingin bertahan hidup tanpa saling melukai?

Pertanyaan ini jarang kita ajukan secara jujur, karena jawabannya sering kali tidak seindah slogan yang kita hafal. Kita terbiasa menyebut kata “kesejahteraan”, “kemajuan”, atau “pembangunan”, tetapi jarang berhenti sejenak untuk merasakan apakah kata-kata itu sungguh menyentuh pengalaman hidup kita sehari-hari.

Apakah hidup bersama yang kita jalani hari ini benar-benar membuat hidup terasa lebih layak?

Atau hanya membuat penderitaan menjadi lebih rapi, lebih administratif, dan lebih sulit dipertanyakan?

Sering kali hidup bersama direduksi menjadi angka. Angka pertumbuhan, angka kemiskinan, angka partisipasi, angka produktivitas. Angka-angka itu memang penting, tetapi ia tidak pernah sepenuhnya mampu menangkap rasa takut seorang ibu yang tidak tahu apakah anaknya akan makan esok hari. Ia tidak mencatat kegelisahan seorang anak yang tumbuh tanpa ruang aman untuk berpikir dan bertanya. Ia tidak mengukur kelelahan batin manusia yang hidupnya diperas demi sesuatu yang disebut kemajuan, tetapi tidak pernah benar-benar ia rasakan.

Jika hidup bersama hanya menghasilkan statistik yang baik tetapi manusia yang letih dan terasing, apakah itu sungguh hidup bersama yang kita inginkan?

Sophokراسi mengajukan satu istilah yang sengaja terdengar sederhana, “kesentosaan hidup bersama”. Bukan kemakmuran yang berlebihan, bukan keseragaman nasib, melainkan kondisi di mana manusia dapat menjalani hidup tanpa rasa terancam secara eksistensial. Hidup tanpa ketakutan dasar akan lapar, sakit, terbuang, atau tidak dianggap.

Kesentosaan bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang tidak terus-menerus berada dalam keadaan kekurangan yang menggerogoti kesadaran. Sebab manusia yang seluruh energinya habis untuk bertahan hidup tidak akan pernah benar-benar memiliki ruang untuk tumbuh sebagai manusia.

Jika tujuan hidup bersama adalah kesentosaan, maka banyak pertanyaan harus diajukan ulang. Mengapa sebagian orang harus menanggung beban hidup yang begitu berat sejak lahir, sementara sebagian lain hidup tanpa pernah memikirkan kebutuhan paling dasar? Apakah ketimpangan semacam itu benar-benar keniscayaan, atau hasil dari kesalahan cara kita mengatur hidup bersama?

Dan jika hidup bersama dimaksudkan untuk saling menopang, sampai di titik mana kita masih bisa menyebutnya hidup bersama ketika penderitaan orang lain dianggap bukan urusan kita?

Sophokrasi tidak menolak perbedaan kemampuan, bakat, atau pilihan hidup. Ia juga tidak menjanjikan keseragaman hasil. Tetapi ia menolak satu hal dengan tegas, bahwa hidup bersama boleh dibangun di atas pengorbanan diam-diam sebagian manusia demi kenyamanan sebagian lainnya.

Dalam kerangka ini, negara, jika memang dipilih sebagai alat hidup bersama, tidak lagi diukur dari seberapa kuat ia mengontrol, tetapi dari seberapa jauh ia menjamin kondisi dasar agar manusia dapat hidup, tumbuh, dan berkontribusi tanpa rasa takut. Negara tidak diminta menciptakan kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah wilayah personal. Tetapi negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kehidupan tidak sejak awal dirusak oleh kekurangan yang seharusnya dapat dicegah.

Maka pertanyaan yang perlu kita simpan bukanlah berapa besar yang telah kita capai, melainkan berapa banyak manusia yang masih terpaksa hidup dalam keadaan yang tidak layak, dan mengapa kita menganggapnya wajar?

Sophokrasi tidak menawarkan jawaban instan atas pertanyaan itu. Ia hanya mengingatkan bahwa hidup bersama kehilangan maknanya, ketika kita berhenti peduli pada kondisi paling dasar manusia yang hidup di dalamnya. Tanpa kepedulian itu, semua bentuk kebersamaan hanyalah kebisingan kolektif yang menutupi kesepian masing-masing.

Jika hidup bersama memang kita pilih, maka barangkali yang perlu kita cari bukanlah kejayaan, melainkan rasa cukup untuk hidup tanpa saling meniadakan.

BAGIAN III

Tentang Legitimasi, Mengapa Kita Taat?

Mengapa kita taat?

Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi jawabannya sering kali kita hindari. Kita lebih mudah menjelaskan kepada siapa kita taat, kepada hukum, kepada negara, dan kepada aturan, daripada menjelaskan mengapa ketaatan itu kita berikan.

Apakah kita taat karena kita setuju?

Ataukah karena kita takut pada konsekuensi jika tidak taat?

Di titik ini, hidup bersama sering kali berdiri di atas ambiguitas. Ketaatan dipuji sebagai kebajikan, tetapi jarang diuji motifnya. Kita diajarkan bahwa taat adalah tanda kedewasaan seorang warga, seolah-olah pertanyaan tentang alasan ketaatan justru menunjukkan sebuah pembangkangan. Namun ketaatan yang tidak pernah ditanya asal-usulnya, akan mudah berubah menjadi kebiasaan yang kosong.

Jika kita taat hanya karena takut, apakah itu masih bisa disebut legitimasi?

Ataukah itu sekadar kepatuhan yang dipelihara oleh ancaman?

Dalam banyak tatanan politik, legitimasi dianggap selesai ketika sebuah prosedur telah dipenuhi, pemilihan dilaksanakan, hukum disahkan, otoritas dibentuk. Setelah itu, ketaatan diasumsikan mengalir dengan sendirinya. Tetapi prosedur hanya menjawab bagaimana kekuasaan itu dibentuk, bukan mengapa ia layak ditaati.

Di sinilah sering muncul jarak yang sunyi antara hukum dan nurani. Hukum bisa tetap berjalan, tetapi hati tidak lagi ikut serta. Peraturan ditaati, tetapi tanpa keyakinan bahwa ia sungguh melayani kehidupan. Dalam jarak itulah ketaatan berubah menjadi rutinitas mekanis, dan hidup bersama kehilangan makna reflektifnya.

Sophokراسi memulai dari kecurigaan yang tenang, bahwa legitimasi tidak bisa diproduksi sepenuhnya dari atas. Ia tidak lahir dari teks hukum, simbol negara, atau prosedur formal semata. Legitimasi hanya mungkin tumbuh dari kesadaran individu yang secara sadar memilih untuk mengikatkan dirinya pada kehidupan bersama.

Dalam kerangka ini, ketaatan bukanlah kewajiban otomatis, melainkan konsekuensi dari pemahaman. Kita taat bukan karena kita diperintah, tetapi karena kita melihat alasan untuk taat. Ketika alasan itu hilang, ketika hukum tidak lagi terasa adil, dan ketika negara tidak lagi hadir dalam kehidupan nyata manusia, ketaatan kehilangan dasar moralnya, meskipun ia mungkin tetap bisa dipaksakan secara legal.

Apakah negara berhak menuntut ketaatan dari individu yang tidak pernah merasakan kehadirannya sebagai penjaga kehidupan?

Apakah hukum layak ditaati jika ia bekerja rapi di atas kertas, tetapi abai terhadap kenyataan paling dasar manusia?

Sophokrasi tidak mendorong pembangkangan. Ia juga tidak merayakan ketidaktaatan. Ia hanya mengembalikan ketaatan ke tempat yang lebih jujur, sebagai pilihan sadar, bukan refleksi dari ketakutan.

Karena itu, legitimasi dalam Sophokrasi tidak dipahami sebagai sesuatu yang statis. Ia tidak diberikan sekali untuk selamanya. Ia harus terus-menerus diperbarui melalui relasi hidup bersama yang nyata. Negara yang ingin ditaati harus terlebih dahulu hadir secara bermakna dalam kehidupan warganya, bukan hanya sebagai penegak aturan, tetapi sebagai penjaga kondisi yang memungkinkan manusia hidup layak dan bermartabat.

Jika negara gagal melakukan itu, maka krisis yang muncul bukan semata krisis hukum, melainkan krisis legitimasi. Dan krisis legitimasi tidak bisa diselesaikan dengan penambahan aturan atau pengetatan sanksi. Ia hanya bisa dihadapi dengan keberanian untuk bertanya ulang, untuk siapa semua ini dijalankan?

Sophokrasi menawarkan satu kemungkinan yang sederhana namun menuntut, bahwa negara hanya layak ditaati sejauh ia masih selaras dengan kesadaran moral individu-individu di dalamnya. Ketika keselarasan itu terjaga, ketaatan tidak perlu lagi dipaksakan. Ia tumbuh dengan sendirinya, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hidup bersama yang dipilih secara sadar.

Dan mungkin di situlah letak ujian sesungguhnya, apakah kita taat karena kita hidup bersama dengan kesadaran, atau karena kita telah terlalu lama lupa bagaimana rasanya memilih secara bebas.

BAGIAN IV

Tentang Kekuasaan, Bukan Kekuasaan Tapi Pelayanan

Mengapa kekuasaan selalu diinginkan?

Pertanyaan ini jarang diajukan dengan jujur, karena kita telah terlalu lama menganggap keinginan untuk berkuasa sebagai sesuatu hal yang wajar, bahkan terpuji. Kita menyebutnya kepemimpinan, mandat, atau tanggung jawab publik. Namun di balik bahasa yang rapi itu, sering kali tersembunyi hasrat yang lebih sederhana, keinginan untuk menentukan, keinginan untuk mengendalikan, dan keinginan untuk diakui.

Apakah memimpin selalu berarti menguasai?

Apakah mengatur orang lain niscaya membutuhkan posisi di atas mereka?

Dalam banyak tatanan politik, kekuasaan dipahami sebagai sesuatu yang harus direbut, dipertahankan, dan diperluas. Ia menjadi pusat gravitasi yang menarik ambisi, kepentingan, dan pertarungan tanpa henti. Bahkan ketika kekuasaan dibungkus dengan niat baik, logika dasarnya sering tidak berubah, ada yang memerintah, dan ada yang diperintah.

Sophokrasi mengajukan satu keberanian konseptual, mengganti bahasa kekuasaan dengan bahasa pelayanan. Bukan sebagai retorika moral, tetapi sebagai pembalikan cara berpikir. Pelayanan tidak dimulai dari posisi, melainkan dari kesadaran. Ia tidak menuntut hak, melainkan memikul beban.

Jika seseorang sungguh sadar akan hidup bersama, apa alasan baginya untuk menguasai orang lain?

Bukankah kesadaran justru memperlihatkan keterbatasan diri sendiri, dan karena itu, ia menuntut kehati-hatian dalam bertindak atas nama banyak orang?

Dalam kerangka Sophokrasi, kepemimpinan tidak diukur dari seberapa besar wewenang yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar tanggung jawab yang sanggup ia dipikul, tanpa mencari keuntungan personal. Pelayanan menjadi bentuk tertinggi dari keterlibatan politik, karena ia menuntut kesiapan untuk bekerja tanpa jaminan pujian, tanpa perlindungan privilese, dan tanpa klaim superioritas moral.

Bahaya terbesar dari kekuasaan bukan hanya penyalahgunaannya, tetapi ilusi yang ia ciptakan, ilusi bahwa dengan menduduki posisi tertentu, seseorang menjadi lebih layak daripada yang lain. Ilusi ini melahirkan jarak, dan jarak melahirkan ketidakpekaan. Dari situlah hidup bersama mulai retak, bukan karena kurangnya aturan, tetapi karena hilangnya rasa saling mengerti.

Sophokrasi menolak ilusi itu. Ia berangkat dari anggapan bahwa semakin sadar seseorang, semakin ia memahami betapa berat dampak setiap keputusan terhadap kehidupan orang lain. Kesadaran semacam ini tidak melahirkan hasrat untuk berkuasa, melainkan kerelaan untuk melayani, dan bahkan kerelaan untuk mundur ketika kesadaran itu goyah.

Apakah mungkin hidup bersama dikelola tanpa perebutan kekuasaan?

Pertanyaan ini sering dijawab dengan sinisme. Namun mungkin yang perlu dipertanyakan bukan kemungkinan itu sendiri, melainkan asumsi kita tentang manusia. Jika manusia selalu diasumsikan egois dan tidak bisa dipercaya, maka kekuasaan akan terus dianggap perlu. Tetapi jika kita membuka ruang bagi pertumbuhan kesadaran, maka logika pelayanan tidak lagi terdengar naif.

Dalam sophokrasi, pelayanan bukan status permanen. Ia selalu bersifat sementara dan dapat ditarik kembali ketika kesadarannya melemah. Tidak ada hak istimewa yang melekat, tidak ada posisi yang harus dipertahankan demi identitas diri. Yang ada hanyalah tanggung jawab yang dijalankan sejauh ia masih bermakna bagi kehidupan bersama.

Mungkin inilah pergeseran paling sulit, menerima bahwa hidup bersama tidak membutuhkan orang-orang yang ingin berkuasa, melainkan orang-orang yang bersedia memikul beban tanpa menjadikannya alat untuk meninggikan diri.

Dan jika pergeseran ini terasa berat, mungkin itu karena kita telah terlalu lama hidup dalam dunia yang mengajarkan bahwa kekuasaan adalah tujuan, bukan masalah yang perlu diatasi.

BAGIAN V

Tentang Hukum dan Keadilan, Apakah Keduanya Selalu Sejalan?

Apakah yang sah selalu adil?

Pertanyaan ini jarang diajukan dengan tenang. Ia sering dianggap mengganggu, bahkan berbahaya, karena menyentuh sesuatu yang telah lama kita anggap selesai. Kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa hukum adalah puncak dari sebuah keteraturan, dan bahwa ketaatan kepadanya merupakan bentuk tanggung jawab tertinggi dari seorang warga negara. Namun di balik keyakinan itu, ada pengalaman-pengalaman manusia yang tidak selalu menemukan dirinya di dalam putusan-putusan hukum.

Hukum berbicara dengan bahasa yang tertata rapi. Ia memiliki pasal, ia memiliki prosedur, dan ia memiliki mekanisme yang dapat diuji. Keadilan tidak selalu hadir dengan keteraturan yang sama. Ia hidup dalam pengalaman diperlakukan dengan setara, dalam penderitaan yang diakui, dan dalam luka yang tidak disangkal. Ketika hukum berjalan tanpa menyentuh pengalaman ini, sebuah jarak akan muncul, dan jarak itu sering ditutup dengan kata yang terdengar final, sah.

Apakah keadilan benar-benar hadir hanya karena hukum telah ditegakkan?

Dalam hidup bersama, kita kerap menyaksikan hukum dijalankan dengan rapi, sementara manusia yang terlibat tetap pulang dengan beban batin yang tidak pernah disentuh. Dari sini, hukum perlahan bergeser dari alat menjadi tujuan. Ia dipatuhi bukan karena ia menjaga kehidupan, tetapi karena ia telah ditetapkan. Kepatuhan pun menjadi dingin, tertib tanpa empati, dan benar tanpa keadilan yang dirasakan.

Sophokrates tidak memulai dari penolakan terhadap hukum. Ia memulai dari pertanyaan yang lebih sunyi, untuk siapa hukum itu ada? Jika hukum dimaksudkan untuk merawat hidup bersama, maka ketika ia gagal melakukannya, yang perlu dipertanyakan bukan sekedar keberanian individu untuk taat, melainkan keberanian kolektif untuk meninjau kembali akan hukum itu sendiri. Sebab hukum yang tidak lagi menyentuh keadilan hanya menyisakan keteraturan tanpa makna.

Dalam cara pandang inilah Sophokrates menyebut hubungannya dengan hukum sebagai *Lex Sophia*. *Lex Sophia* bukan nama bagi hukum yang baru. Ia hanyalah cara memandang hukum sebagai pendamping kesadaran, bukan sebagai penguasa kehidupan. Hukum hadir karena manusia belum sepenuhnya sadar. Ia bekerja sebagai penahan, sebagai pengingat, sebagai penuntun sementara, bukan sebagai tujuan akhir dari hidup bersama.

Karena itu, kesalahan tidak semata dilihat sebagai pelanggaran pribadi, melainkan sebagai isyarat bahwa ada sesuatu yang terputus dalam jalinan kebersamaan. Ketika seseorang mencuri karena lapar, apakah keadilan cukup jika kita hanya menghukumnya? Ketika seseorang melanggar aturan karena tidak pernah diberi ruang untuk tumbuh, apakah hukum telah menjalankan perannya hanya dengan menjatuhkan sanksi?

Dalam *Lex Sophia*, hukuman tidak dimaksudkan untuk membalas. Ia dimaksudkan untuk menyadarkan. Ia adalah upaya mengembalikan manusia pada makna hidup bersama yang sempat ia tinggalkan. Dan ketika pemahaman itu tumbuh, hukum tidak perlu lagi memaksa. Dan ketika pemahaman itu ditolak, hidup bersama tidak dapat dipertahankan dengan paksaan yang hampa.

Apakah keadilan berarti semua orang harus tetap berada di dalam, apa pun pilihan yang ia ambil?

Ataukah keadilan justru menuntut kejujuran untuk mengakui bahwa kebersamaan hanya mungkin jika ada kesediaan untuk menjaga satu sama lain?

Dalam Sophokrasi, hukum bekerja sejauh ia membantu manusia bergerak dari keterpaksaan menuju kesadaran. Ketika kesadaran itu tumbuh, hukum tidak dihapus, tetapi ditinggalkan, karena fungsinya telah selesai dijalankan.

Maka pertanyaan yang tersisa bukan lagi tentang seberapa keras hukum ditegakkan, melainkan tentang masyarakat seperti apa yang ingin kita bangun, masyarakat yang tertib karena takut dihukum, atau masyarakat yang adil karena memahami mengapa keadilan itu perlu dijaga.

Jika suatu hari hukum dan keadilan tidak lagi berjalan seiring, Sophokrasi memilih untuk tetap berdiri di sisi keadilan, bukan sebagai slogan, tetapi sebagai kesediaan untuk terus menguji apakah aturan yang kita patuhi masih setia pada tujuan hidup bersama itu sendiri.

BAGIAN VI

Tentang Manusia, Makhluk Yang Harus Diawasi Atau Bisa Dipercaya?

Bagaimana sebenarnya kita memandang manusia?

Apakah manusia pada dasarnya rapuh dan berbahaya, sehingga harus terus diawasi, diatur, dan dikendalikan?

Ataukah manusia memiliki kemungkinan untuk bertumbuh, belajar, dan mengatur dirinya sendiri jika diberi ruang yang tepat?

Cara kita menjawab pertanyaan ini diam-diam menentukan seluruh bangunan hidup bersama. Negara yang lahir dari kecurigaan akan membangun sistem pengawasan, dan negara yang lahir dari kepercayaan akan membangun ruang pendidikan. Perbedaan keduanya tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi dampaknya terasa di dalam cara manusia diperlakukan sehari-hari.

Sering kali kita mengatakan bahwa pengawasan diperlukan “demi kebaikan bersama”. Namun benarkah kebaikan bisa tumbuh dari kecurigaan yang dilembagakan? Ataukah pengawasan yang terus-menerus justru membentuk manusia yang terbiasa patuh, tetapi kehilangan keberanian untuk berpikir dan bertanggung jawab?

Sophokrasi tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa manusia dapat berbuat salah. Ia tidak meromantisasi sifat manusia, dan tidak menganggap kesadaran sebagai sesuatu yang otomatis. Namun ia menolak satu asumsi yang lebih berbahaya, asumsi bahwa manusia selamanya harus diperlakukan sebagai objek yang tidak bisa dipercaya.

Dalam kerangka Sophokrasi, manusia dipahami sebagai makhluk yang mampu bertumbuh secara bertahap. Kesadaran tidak hadir sekaligus, ia lahir dari pengalaman, dari relasi, dari pendidikan, dan dari kegagalan yang dihadapi dengan jujur. Karena itu, pengawasan bukanlah tujuan, melainkan kondisi sementara yang harus ditinggalkan ketika kesadaran mulai terbentuk.

Apakah kita sungguh ingin hidup dalam masyarakat yang terus memperlakukan warganya seolah-olah mereka belum dewasa?

Ataukah kita berani membayangkan masyarakat yang secara perlahan melepaskan pengawasan, seiring dengan tumbuhnya tanggung jawab?

Sophokrasi mengajukan kemungkinan tentang *Homo Sophicus*, manusia yang telah mencapai tingkat kesadaran di mana ia tidak lagi membutuhkan pengawasan eksternal yang ketat, karena pengawasannya telah berpindah ke dalam dirinya sendiri. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia telah selesai dengan dorongan untuk merugikan orang lain demi kepentingan sempit dirinya sendiri.

Homo Sophicus bukan hasil seleksi elit, bukan gelar, dan bukan status yang bisa diwariskan. Ia adalah kondisi yang rapuh dan selalu bisa goyah. Karena itu, Sophokrasi tidak menciptakan kasta permanen, melainkan tingkat tanggung jawab yang selalu dapat berubah. Ketika kesadaran melemah, tanggung jawab dapat ditarik. Ketika kesadaran tumbuh, tanggung jawab dapat diberikan kembali.

Di sini, kepercayaan bukanlah hadiah, melainkan konsekuensi dari kesiapan. Negara tidak memaksa manusia menjadi dewasa, tetapi ia juga tidak mengunci manusia dalam ketidakdewasaan. Ia menyediakan jalan, bukan tujuan.

Pertanyaan yang lebih jujur mungkin bukan apakah manusia bisa dipercaya, tetapi apakah kita pernah benar-benar memberinya kesempatan untuk menjadi layak dipercaya. Apakah sistem yang kita bangun mendorong pertumbuhan kesadaran, atau justru menumbuhkan ketergantungan pada pengawasan?

Sophokrasi tidak menjanjikan masyarakat tanpa kesalahan. Ia hanya menawarkan satu keberanian, memperlakukan manusia bukan semata sebagai risiko yang harus dikendalikan, melainkan sebagai kemungkinan yang layak diberi ruang untuk tumbuh.

Dan mungkin di sanalah letak pertaruhan. Apakah kita memilih hidup bersama dengan keyakinan bahwa manusia dapat belajar bertanggung jawab, atau kita terus membangun dunia yang menganggap kedewasaan sebagai sebuah ancaman.

BAGIAN VII

Tentang Kegagalan Negara, Kapan Segalanya Sebenarnya Runtuh?

Kapan sebuah negara sebenarnya gagal?

Apakah ketika ekonominya runtuh?

Apakah ketika institusinya lumpuh?

Ataukah ketika hukum tidak lagi ditaati?

Pertanyaan-pertanyaan itu sering diajukan, tetapi barangkali belum menyentuh inti persoalan. Negara dapat bertahan dalam kemiskinan, tetap berjalan di tengah krisis, bahkan tetap berdiri meski institusinya rapuh. Namun ada satu kegagalan yang tidak selalu terlihat, dan justru karena itu paling berbahaya, matinya kepekaan moral manusia di dalamnya.

Sebuah negara mulai runtuh bukan ketika ia kehilangan kendali, melainkan ketika penderitaan orang lain tidak lagi terasa sebagai masalah bersama. Ketika ketidakadilan disaksikan setiap hari, tetapi hanya menimbulkan kebosanan. Ketika hukum ditegakkan dengan sempurna, tetapi tidak lagi memancing pertanyaan tentang benar atau salah.

Apakah sebuah negara masih hidup ketika warganya berhenti peduli?

Dalam banyak tatanan modern, kegagalan negara disamarkan oleh keberhasilan administratif. Sistem bekerja, prosedur dijalankan, laporan disusun. Namun di balik keteraturan itu, kehidupan manusia perlahan menjadi dingin. Yang lemah dianggap statistik, yang tertinggal dianggap beban, dan yang terluka diminta menyesuaikan diri dengan sistem yang tidak pernah benar-benar memikirkan mereka.

Sophokrasi memandang kegagalan negara bukan sebagai peristiwa tiba-tiba, melainkan sebagai proses peluruhan batin kolektif. Ia terjadi ketika hidup bersama kehilangan rasa. Ketika manusia lebih sibuk membela aturan daripada merawat sesamanya. Ketika kepatuhan dianggap cukup untuk menggantikan keadilan.

Jika negara dibentuk untuk memungkinkan hidup bersama secara bermakna, apa artinya mempertahankan negara yang telah kehilangan makna itu?

Pertanyaan ini tidak mudah, dan sering ditolak dengan ketakutan. Kita takut pada kekosongan, kita takut pada kekacauan, kita takut pada ketidakpastian. Namun ketakutan itu sering membuat kita mempertahankan sesuatu yang sudah tidak lagi hidup. Kita menjaga bentuk, sambil mengabaikan isinya.

Sophokrasi mengajukan satu keberanian etis, bahwa negara tidak harus dipertahankan dengan segala cara. Jika ia tidak lagi melayani kehidupan bersama, jika ia tidak lagi menjaga kondisi dasar manusia untuk hidup dan bertumbuh, maka mempertahankannya hanya karena kebiasaan atau karena loyalitas simbolik adalah bentuk ketidakjujuran kolektif.

Ini bukan seruan untuk meninggalkan hidup bersama. Justru sebaliknya. Ini adalah pengingat bahwa hidup bersama lebih penting daripada bentuk apa pun yang pernah kita bangun untuk menampungnya. Negara hanyalah salah satu wadah. Ketika wadah itu retak dan melukai isinya, keberanian untuk mengakui kegagalan menjadi langkah pertama menuju kemungkinan yang lain.

Apakah kita berani mengakui bahwa sebuah negara bisa mati sebelum ia runtuh secara fisik?

Dan jika iya, apakah kita cukup jujur untuk bertanya apakah kita masih hidup di dalamnya, atau hanya bertahan di antara reruntuhan yang tertata rapi?

Sophokrasi tidak menawarkan solusi cepat atas kegagalan semacam ini. Ia hanya menolak satu kebohongan, bahwa hidup bersama bisa diselamatkan tanpa kepekaan moral. Tanpa kepekaan itu, semua sistem hanyalah mekanisme kosong yang terus bergerak tanpa arah.

Mungkin kegagalan negara bukan akhir dari segalanya. Mungkin ia justru tanda bahwa sudah waktunya manusia bertanya kembali, untuk apa kita hidup bersama, dan apa yang benar-benar layak kita pertahankan.

BAGIAN VIII

Tentang Negara Sophian, Wadah yang Tidak Menyamar sebagai Tujuan

Jika sebuah negara dapat gagal sebelum ia runtuh, lalu apa yang tersisa setelah kegagalan itu diakui?

Pertanyaan ini sering dijawab dengan tergesa-gesa. Ada yang segera mencari bentuk negara baru, ada yang menyusun ulang sistem, ada pula yang berharap pada figur pemimpin yang lebih bermoral. Namun barangkali kegagalan negara tidak pertama-tama menuntut bentuk yang lain, melainkan menuntut untuk mencari cara yang lain dalam memandang hidup bersama.

Sophokrasi tidak lahir untuk menggantikan negara yang gagal dengan negara yang lebih sempurna. Ia lahir dari kecurigaan yang lebih dalam, bahwa persoalan hidup bersama tidak selalu berakar pada bentuk, melainkan pada watak wadah yang kita bangun dan kita rawat.

Dalam kerangka inilah istilah *Negara Sophian* muncul. Bukan sebagai nama rezim, bukan sebagai desain institusional, melainkan sebagai penanda etis. Ia menunjuk pada suatu kemungkinan, bahwa sebuah wadah hidup bersama dapat dibayangkan dan dijalani tanpa menyakralkan dirinya sendiri.

Negara Sophian bukan negara yang mengklaim diri paling benar. Ia adalah negara yang sadar bahwa keberadaannya bersifat sementara, bergantung, dan dapat ditinjau ulang. Ia tidak menuntut ketaatan sebagai bukti loyalitas, melainkan berusaha layak ditaati sejauh ia masih menjaga kehidupan di dalamnya.

Namun sebelum sampai pada negara, Sophokrasi mengingatkan bahwa watak semacam ini tidak lahir di tingkat tertinggi kehidupan bersama. Ia tumbuh, atau gagal tumbuh, sejak relasi paling awal manusia dengan manusia lain.

Keluarga, misalnya, sering dianggap wilayah privat yang terpisah dari politik. Padahal di sanalah manusia pertama kali belajar tentang kuasa, tentang ketergantungan, tentang ketaatan, dan tentang perlindungan. Sebuah keluarga dapat menjadi wadah yang memungkinkan kesadaran untuk bertumbuh, tetapi dapat pula menjadi ruang di mana ketakutan dan dominasi dinormalisasi.

Keluarga yang bersifat Sophian bukan keluarga yang tanpa konflik, melainkan keluarga yang tidak lagi menjadikan kuasa sebagai alat penundukan. Ia memberi rasa aman tanpa mematikan kebebasan, dan menuntut tanggung jawab tanpa menghapus martabat. Di dalamnya, kepatuhan tidak dibeli dengan ancaman, dan kasih tidak dijadikan alat kontrol.

Dari keluarga, manusia bergerak ke komunitas. Di sinilah hidup bersama mulai kehilangan keintimannya, tetapi belum sepenuhnya menjadi anonim. Komunitas mempertemukan yang berbeda, memperbesar jarak, dan sekaligus menguji keadilan.

Komunitas yang bersifat Sophian tidak ditandai oleh keseragaman nilai, melainkan oleh kesediaan menjaga yang rapuh di tengah perbedaan. Ia tidak menutup diri dari koreksi, dan tidak mengusir yang lain hanya karena mengganggu kenyamanan. Dalam komunitas semacam ini, keadilan belum hadir sebagai hukum yang kaku, tetapi sebagai rasa tanggung jawab bersama yang terus diuji.

Ketika skala hidup bersama membesar, komunitas tidak lagi cukup. Negara pun muncul, bukan sebagai puncak etika, melainkan sebagai konsekuensi dari keterbatasan manusia. Negara dibutuhkan karena kesadaran tidak pernah merata, dan karena kepercayaan tidak selalu dapat dijaga tanpa perlindungan.

Negara Sophian, dalam pengertian ini, bukan negara yang meniadakan kekuasaan, melainkan negara yang menahan diri dalam menggunakan kekuasaan. Ia sadar bahwa setiap pemaksaan memiliki harga moral. Ia tidak menyamakan dominasi sebagai ketertiban, dan tidak mengganti keadilan dengan kepatuhan semata.

Negara semacam ini tidak menuntut warganya percaya secara membuta. Ia justru membuka ruang bagi pertanyaan, kritik, dan peninjauan ulang. Legitimasi tidak dianggap sebagai warisan permanen, melainkan sebagai relasi hidup yang harus terus dirawat.

Namun Sophokrasi tidak berhenti pada negara. Dalam dunia yang saling terhubung, penderitaan tidak lagi berhenti di batas wilayah. Keputusan di satu tempat dapat melukai kehidupan di tempat lain. Dalam konteks ini, membayangkan hidup bersama hanya dalam kerangka negara menjadi semakin sempit.

Di sinilah gagasan *Dunia Sophian* dapat dipahami. Bukan sebagai pemerintahan global, bukan sebagai tatanan yang memusat, melainkan sebagai imajinasi etis. Ia adalah kesadaran bahwa hidup bersama manusia melampaui batas politik, dan bahwa tanggung jawab tidak selalu menunggu mandat kekuasaan.

Dunia Sophian tidak memiliki pusat, tidak mengklaim kedaulatan moral, dan tidak menawarkan kesatuan semu. Ia hanya menegaskan satu hal, bahwa penderitaan manusia di mana pun tetap menuntut kepekaan, bahkan ketika hukum dan negara tidak hadir.

Keluarga, komunitas, negara, dan dunia, dalam kerangka Sophokrasi, bukanlah tingkatan administratif. Mereka adalah lapisan relasi, yang masing-masing dapat bersifat Sophian sejauh ia masih melayani kehidupan, dan berhenti menjadi Sophian ketika ia lebih sibuk mempertahankan diri daripada merawat manusia di dalamnya.

Karena itu, Negara Sophian bukan tujuan akhir. Ia bukan model yang harus diwujudkan, apalagi dipaksakan. Ia hanyalah nama bagi sebuah sikap, keberanian untuk tidak menyamakan wadah dengan makna hidup bersama.

Mungkin tidak ada negara yang sepenuhnya Sophian. Mungkin tidak ada keluarga, komunitas, atau dunia yang bebas dari kegagalan. Namun Sophokrasi tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya menolak satu kebohongan terakhir, bahwa hidup bersama dapat dijalani dengan mengorbankan kepekaan moral, lalu diselamatkan oleh sistem.

Jika negara hanyalah salah satu wadah, dan jika wadah itu selalu bisa retak, maka pertanyaan yang tersisa bukanlah bagaimana membangun bentuk yang abadi, melainkan bagaimana tetap menjaga watak hidup bersama agar tidak mati di dalam bentuk apa pun.

Dan di titik inilah pertanyaan itu kembali, tanpa jawaban final, tanpa jaminan, tetapi dengan kejujuran yang lebih sunyi, untuk apa kita hidup bersama, jika bukan untuk saling menjaga agar tidak kehilangan rasa sebagai manusia?

EPILOG

Pertanyaan yang Dikembalikan

Setelah semua ini dibaca, mungkin tidak ada jawaban yang benar-benar dapat dipegang. Dan barangkali memang tidak seharusnya ada. Tulisan ini telah berbicara tentang negara, tentang kegagalannya, tentang kemungkinan lain yang dapat dibayangkan tanpa disakralkan. Namun pada akhirnya, semua itu tidak pernah dimaksudkan untuk berdiri sebagai kesimpulan. Ia hanya ingin membuka satu ruang sunyi, tempat manusia dapat kembali berhadapan dengan pilihannya sendiri.

Sophokrazi tidak menawarkan bentuk hidup bersama yang harus diwujudkan. Ia juga tidak meminta manusia mengganti satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Ia hanya mengingatkan bahwa hidup bersama selalu berjalan di atas watak yang kita rawat, jauh sebelum ia menjelma menjadi sistem, hukum, atau institusi.

Jika sebuah keluarga dapat menjadi tempat tumbuhnya martabat, atau sebaliknya tempat pertama di mana martabat itu dilukai, maka hidup bersama tidak pernah dimulai dari negara. Jika sebuah komunitas dapat menjaga yang rapuh, atau justru menyingkirkan yang tidak seragam, maka keadilan tidak pernah sepenuhnya bergantung pada hukum. Dan jika sebuah negara dapat melayani kehidupan, atau membekukannya dengan keteraturan yang dingin, maka legitimasi tidak pernah lahir dari keberadaannya semata.

Pertanyaan yang tersisa bukanlah bentuk apa yang paling benar, melainkan watak apa yang sedang kita hidupi.

Apakah kita masih mampu merasakan penderitaan orang lain sebagai sesuatu yang menyentuh kita?

Apakah kita masih berani mempertanyakan hukum yang sah tetapi melukai?

Apakah kita masih menjaga hidup bersama sebagai relasi yang hidup, atau telah menggantinya dengan kebiasaan yang tertata rapi?

Sophokrazi tidak menuntut manusia menjadi lebih baik dari kemampuannya. Ia hanya menolak satu penghiburan palsu, bahwa sistem dapat menggantikan kepekaan, dan bahwa bentuk dapat menyelamatkan makna hidup bersama dengan sendirinya.

Jika setelah membaca ini seseorang memilih untuk tetap hidup di dalam tatanan yang ada, biarlah itu menjadi pilihan yang sadar. Jika seseorang merasa perlu menjaga watak hidup bersama di lingkaran kecil yang ia miliki, biarlah itu dijalani tanpa klaim moral. Dan jika seseorang memilih untuk tidak menamai apa pun, mungkin justru di situlah kejujuran pertama bermula.

Tulisan ini berhenti di sini, bukan karena pertanyaannya telah selesai, tetapi karena tidak ada tulisan yang berhak menutup pertanyaan tentang hidup bersama. Pertanyaan itu tidak pernah menjadi milik konsep, teori, atau manifesto apa pun. Ia selalu kembali kepada manusia yang menjalaninya, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam negara, dan dalam dunia yang terus berubah.

Dan mungkin, sejauh kita masih berani menjaga kepekaan itu, hidup bersama belum sepenuhnya kehilangan maknanya.